

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dimasyarakat, sehingga mampu menjadikan masyarakat yang memiliki daya saing serta kemampuan dalam menyerap teknologi nantinya dalam mendorong peningkatan suatu produktivitas. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bertumpu pada pembangunan di bidang Pendidikan. Dengan semakin tinggi tingkat Pendidikan, maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dapat diketahui bahwa salah satu keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang, tidak semata mata hanya karena keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik dan benar.

Pentingnya peran pendidikan menandakan bahwa dalam pembangunan sektor pendidikan harus bisa menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu setiap warga negara berhak dalam memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban khusus dalam menyediakan pendidikan yang baik dan bermutu. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana

telah diamanatkan yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sejalan dengan itu, pasal 28 ayat (1) UUD 1945 mengamankan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam amanat tersebut menyiratkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak dalam peningkatan kesejahteraan, karena ukuran kesejahteraan dilihat dari kualitas pendidikan. Tetapi karena kualitas pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang, maka tidak mampu menunjukkan hasil yang seketika. Dikarenakan luasnya negara kita, proses pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar, dan perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar tercapainya pendidikan secara merata keseluruh penjuru nusantara.

Dalam penelitiannya Henry Sahat mengungkapkan bahwa ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan, yaitu dengan menyebarkan pembangunan sekolah dasar (SD) ke seluruh pelosok negeri melalui program SD Inpres, Gerakan Nasional Orang tua Asuh (GNOTA), mencanangkan gerakan wajib belajar 6 tahun (tingkat SD) pada 2 Mei 1984, diteruskan dengan program wajib

belajar 9 tahun (tingkat SMP) pada pertengahan tahun 1990-an, tetapi pada tingkat SMA program wajib belajar baru mulai dicanangkan dan dikaji pada tahun 2008, dan berbagai pendukung lainnya dalam upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan.¹

Tabel I.1

Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Tabel 4.5.3 Persentase Pemuda Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Perkotaan + Perdesaan			Jumlah
			SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,46	2,42	11,96	31,98	53,17	100,00
Sumatera Utara	1,22	4,16	14,17	33,40	47,05	100,00
Sumatera Barat	0,62	8,28	15,14	31,20	44,76	100,00
Riau	0,93	4,88	19,85	30,39	43,96	100,00
Jambi	0,57	4,75	21,25	33,53	39,90	100,00
Sumatera Selatan	0,77	6,36	21,46	32,31	39,10	100,00
Bengkulu	0,58	5,42	18,87	32,11	43,01	100,00
Lampung	0,80	4,48	23,04	38,40	33,28	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,04	12,47	24,98	26,27	35,24	100,00
Kepulauan Riau	0,56	2,47	10,36	25,93	60,68	100,00
DKI Jakarta	0,41	1,32	8,45	23,53	66,30	100,00
Jawa Barat	0,41	3,58	24,07	34,64	37,30	100,00
Jawa Tengah	0,49	2,93	21,32	40,78	34,48	100,00
DI Yogyakarta	0,46	0,63	7,84	26,66	64,40	100,00
Jawa Timur	0,85	3,38	19,40	36,60	39,78	100,00
Banten	0,90	3,78	20,78	32,54	42,00	100,00
Bali	0,79	2,39	12,60	27,99	56,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,66	6,22	19,69	33,71	38,72	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,80	12,34	27,24	26,90	30,72	100,00
Kalimantan Barat	1,97	9,96	28,99	30,14	28,95	100,00
Kalimantan Tengah	0,52	6,99	27,12	29,66	35,71	100,00
Kalimantan Selatan	1,38	8,40	24,98	30,14	35,09	100,00
Kalimantan Timur	0,63	3,07	15,64	27,76	52,91	100,00
Kalimantan Utara	0,95	8,21	17,24	31,14	42,45	100,00
Sulawesi Utara	0,42	8,30	13,01	30,31	47,96	100,00
Sulawesi Tengah	1,60	7,27	22,96	30,07	38,10	100,00
Sulawesi Selatan	1,94	8,01	20,22	28,33	41,50	100,00
Sulawesi Tenggara	0,85	7,34	15,71	30,22	45,88	100,00
Gorontalo	1,15	19,86	20,74	25,51	32,73	100,00
Sulawesi Barat	2,36	13,26	25,17	27,26	31,95	100,00
Maluku	0,91	4,35	13,31	28,46	52,97	100,00
Maluku Utara	0,72	7,33	18,50	28,98	44,48	100,00
Papua Barat	4,02	6,37	16,48	26,43	46,71	100,00
Papua	24,24	7,76	18,41	22,77	26,82	100,00
Indonesia	1,14	4,60	19,85	33,25	41,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas Kor 2015

¹ Henri Sahat, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011, h. 2

Diketahui bahwa sebesar 24.24 persen pemuda di Indonesia daerah Timur memiliki ijazah Sekolah Menengah (SM) keatas (jenjang SM dan Perguruan Tinggi). Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa persentase pemuda yang tidak/belum tamat SD sebesar 4.60 persen, tamat SD/sederajat 19.85 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 33.25 persenn. Sedangkan pemuda yang sama sekali tidak pernah sekolah persentasenya sebesar 1.14 persen.

Dari banyaknya upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemerataan pendidikan nyatanya masih belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan. Dimana dalam era pembangunan yang sedang gencargencarnya ini, ketimpangan masih sangat dirasakan oleh wilayah-wilayah Indonesia yang berada jauh dari jangkauan pemerintah pusat, serta tidak meratanya pendidikan keseluruh penjuru nusantara.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan baik diwilayah barat maupun wilayah timur. Dari beberapa data yang telah diuraikan diatas menggambarkan betapa bobroknya dunia pendidikan di negeri kita ini, dimana masih banyak penduduk di berbagai daerah yang belum bisa mengenyam pendidikan. Hal itu dapat terlihat bahwa setiap kenaikan jenjang pendidikan, semakin rendah pula tingkat partisipasi sekolah penduduk yang berakibat pada rendahnya pencapaian sekolah.

Peran pemerintah melalui kebijakan pengalokasian anggaran bidang pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendidikan. Kebijakan agar APBN & APBD memberikan 20 persen untuk pos pendidikan tampaknya tidak lebih angan-angan. Terbukti, hingga tahun 2016 provinsi yang benar benar menjalankan amanat undang-undang itu bisa dihitung dengan jari. Data yang diperoleh dari Kompas.com dari salah satu kementerian, menunjukkan baru satu provinsi yang anggaran pendidikannya sudah 20 persen, Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta sebesar 22 persen. Lima daerah teratas dengan alokasi dana pendidikan tertinggi di Indonesia antara lain, DKI Jakarta 22,3 persen, Kalimantan Selatan 9,8 persen, Yogyakarta 9,7 persen, Kepulauan Riau 9,6 persen, dan Maluku Utara 9,2 persen. Sementara daerah dengan alokasi dana pendidikan terendah yakni Jawa Timur 1,7 persen dan Papua 1,4 persen.²

Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, bahwa setiap wajib negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Melalui perubahan pasal 31 UUD 1945, adanya ketetapan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20

² Kompas.com “Mendikbud Prihatin Banyak Daerah Alokasi Anggaran Pendidikan di bawah 20 Persen”, 23 Agustus 2015, (<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/17263051/mendikbud-prihatin-banyak-daerah-alokasikan-anggaran-pendidikan-di-bawah-20>), diakses pada tanggal 29 maret 2018 pukul 20.00

persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berujung kepada dimasukkannya gaji guru dalam perhitungan 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3

Hal tersebut menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum terbantu dengan anggaran Pendidikan tersebut dan mereka masih merasa sulit dalam mengakses Pendidikan dikarenakan bantuan-bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran sehingga ketimpangan akan terus terjadi pada daerah yang kekurangan sokongan dalam hal anggaran Pendidikan.

Masalah ketimpangan pendidikan tidak terlepas dari faktor kemiskinan penduduk. Dimana terjadi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Pendapatan perkapita di tiap daerah yang berbeda-beda dan menunjukkan kemampuan mengakses pendidikan yang berbeda di tiap daerah karena mahal biaya sekolah yang menjadi beban tersendiri bagi daerah yang memiliki Pendapatan perkapita yang rendah.

Rendahnya partisipasi sekolah dikarenakan tingginya biaya yang dibebani yaitu biaya-biaya langsung pendidikan individual (ongkos, buku,

3 Fery, Ekonomi Publik (Yogyakarta : BPFE 2002) h.79

uang, seragamdll.) serta biaya biaya tidak langsung. Dalam biaya tidak langsung seorang anak yang sudah mencapai umur dimana sudah dapat memberikan sumbangan kepada penghasilan keluarga akan memilih untuk bekerja daripada memperoleh pendidikan, hal ini sangat berkaitan dengan masih rendahnya pendapatan atau penghasilan keluarga.

Sejalan dengan uraian diatas, bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan, diantaranya:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pengerluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan PDRB Perkapita secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?

C. Pembatasan masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah yang menyebabkan ketimpangan pendidikan sangat luas. Berhubungan dengan keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi dana dan waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan PDRB Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia”.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.
2. Apakah terdapat pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia.
3. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan PDRB Perkapita secara bersama-sama terhadap ketimpangan di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan pengetahuan baru mengenai apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bahan acuan, serta masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, baik dalam rangka mengontrol dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan maupun dalam rangka membuat perencanaan ke depan sehingga langkah-langkah kebijakan dalam bidang pendidikan yang ditempuh dapat mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi.